

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Fenomena kemiskinan merupakan masalah penting yang saat ini melanda Kabupaten Kulonprogo. Kemiskinan kini juga menjadi fokus perhatian bagi pemerintah kabupaten Kulonprogo. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks, dimana masalah tersebut selalu berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan itu bisa terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami disebabkan karena sumber daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Sedangkan untuk kemiskinan Buatan diakibatkan oleh imbas dari kebijakan para birokrat yang kurang berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnyanya untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. Dampaknya, para ekonom selalu gencar mengkritik kebijakan pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ketimbang dari pemerataan.

Dalam era globalisasi saat ini kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh semua manusia. Kebutuhan itu meliputi sandang, pangan dan papan. Untuk kebutuhan papan masih banyak diantara masyarakat kulonprogo yang belum mempunyai rumah layak huni. Di dalam konstitusi kita telah diatur menurut pasal 5 ayat (1) UU no 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman setiap warga negara mempunyai hak untuk untuk menempati dan atau menikmati

dan atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Pada dasarnya persoalan perumahan dan pemukiman di Indonesia.

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengatakan angka kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo masih 23 persen. Untuk mengatasi kemiskinan tersebut, Kabupaten Kulonprogo telah melakukan berbagai kegiatan dan mengerahkan kader penanggulangan kemiskinan. Hasto Wardoyo mengemukakan hal tersebut pada pertemuan kader penanggulangan kemiskinan dan camat se Kabupaten Kulonprogo di Wates, Jumat (21/3). Selama ini masyarakat miskin mempunyai keterbatasan akses terhadap fasilitas dan layanan yang telah disediakan pemerintah. Sehingga mereka tidak dapat memanfaatkannya agar bisa terbebas dari kemiskinan karena itu, kata Hasto, melalui dampingan kader penanggulangan kemiskinan diharapkan masyarakat miskin akan lebih mudah untuk mengakses fasilitas dan layanan yang tersedia. “Pada gilirannya nanti diharapkan semua masyarakat miskin di Kabupaten Kulonprogo dapat memanfaatkan fasilitas dan layanan sesuai dengan kebutuhannya,” kata Hasto

Para kader penanggulangan kemiskinan dan camat seluruh Kabupaten Kulonprogo diharapkan memberikan pelatihan ketrampilan. Selain itu, juga diberikan stimulan modal usaha melalui bantuan sosial kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang masih produktif tentunya akan memberikan peluang usaha bagi mereka untuk dapat meningkatkan perekonomian keluarganya. Hasto mengingatkan bahwa Kabupaten Kulonprogo telah mempunyai Album Kemiskinan. Namun album tersebut harus dicek datanya, sesuai dengan berbagai

persyaratan atau kriteria yang telah ditentukan. Kehidupan masyarakat terkait dengan perekonomian tentunya tidak stagnan, karena seiring dengan perkembangan zaman yang semakin dinamis, tidak dapat dipungkiri lagi dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

“Mungkin ada saudara kita yang dulu hidupnya baik secara ekonomi, namun karena berbagai masalah ekonominya menjadi turun dan bahkan sampai pada titik di bawah garis kemiskinan. Namun ada pula yang dulu ekonominya di bawah garis kemiskinan, karena usahanya yang keras maka dapat meningkatkan pendapatan keluarganya, sehingga secara ekonomi dapat hidup lebih baik. Nah hal-hal yang kemungkinan dapat terjadi tersebut, harus secara jeli dicermati sehingga data yang diperoleh dapat mendekati kebenaran atau bahkan dapat dikatakan valid,” kata Hasto¹.

Pemda DIY dan Pemkab Kulonprogo juga memiliki program lokal pengentasan kemiskinan. Pemda DIY memberikan bantuan Rp1 juta per kepala keluarga (KK) untuk kegiatan ekonomi produktif. Sementara itu, program pengentasan kemiskinan dari Pemkab Kulon Progo yakni bedah rumah, program orang tua asuh, program padat karya dan Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB)².

Berdasarkan dari UUD'45 tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Di dalam konstitusi kita sudah diatur bahwa mereka yang masuk dalam kategori miskin seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Meskipun demikian masalah kemiskinan tidak dapat dibiarkan begitu saja dan kita hanya mengandalkan campur tangan dari Pemerintah untuk mengatasinya. Dalam

¹<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/14/03/22/n2sq1p-kulonprogo-kerahkan-kader-penanggulangan-kemiskinan> diambil pada minggu 2 oktober 2014, pukul 21.20

²<http://www.harianjogja.com/baca/2014/08/13/pengentasan-kemiskinan-di-kulonprogo-dianggap-berhasil-ini-hasilnya-525873> diambil pada 2 november 2014 pukul 20.30

rangka mengatasi kemiskinan itu pemerintah juga harus lebih aktif lagi untuk mengajak seluruh elemen masyarakat yang ada dalam menangani kemiskinan karena masalah kemiskinan ini tidak akan bisa diselesaikan begitu saja jika tidak adanya kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dan masyarakat .

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan per September 2013 mencapai 28,55 juta orang atau naik dibandingkan Maret 2013 yang mencapai 28,07 juta orang. Jumlah kemiskinan di September 2013 ini setara dengan 11,47% dari jumlah penduduk indonesia.³

Penduduk Kabupaten Kulon Progo menurut hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 tercatat sebanyak 388.869 jiwa yang terdiri dari 190.694 laki-laki dan 198.175 Perempuan .Permasalahan penduduk yang sangat mendapat perhatian pemerintah adalah pengentasan kemiskinan, berbagai macam program juga telah diluncurkan untuk mengentaskan kemiskinan.Di Kabupaten Kulon Progo tahun 2011, menurut tahapan keluarga terdapat sebanyak 123.105 keluarga yaitu keluarga Pra KS sebanyak 44.711 keluarga (36,32 persen), keluarga KS I sebanyak 25.972 keluarga (21,10 persen), keluarga KS II sebanyak 13.512 keluarga (27,97 persen), keluarga KS III sebanyak 34.434 keluarga (27,97 persen) dan sebanyak 4.476 keluarga (3,64 persen) adalah keluarga KS III+⁴.

Berdasarkan data Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kehutanan (KP4K), hingga 2013, masih ada 34 desa yang menyanggah status

³ (<http://www.voaindonesia.com/content/bps-tingkat-keliskinan-indonesia-menurun/1948483.html> diambil pada 19 oktober 2014 pukul 7:55)

⁴ <http://www.kulonprogokab.go.id/v21/penduduk-dan-tenaga-kerja> 15 hal diambil pada,10 oktober 2014 pukul 10.15

rawan pangan. Angka ini berkurang dari jumlah sebelumnya, 38 desa. Kepala KP4K Kulonprogo Maman Sugiri mengatakan, desa rawan pangan mayoritas berada di wilayah utara meliputi Kecamatan Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo dan Kokap. Namun sebagian kecil juga ada di Sentolo dan Lendah."Paling banyak ada di wilayah utara, kemudian Sentolo dan Lendah. Untuk daerah lainnya relatif kecil. Jumlahnya masih cukup besar mencapai 34, sebelumnya 38 desa. Datanya ada pergeseran memang, yang tadinya rawan jadi tidak dan dari waspada jadi rawan⁵.

Tabel 1.1. Daftar RTLH (rumah tidak layak huni) di Kabupaten Kulonprogo tahun 2013-2014

Kecamatan	Jumlah
Temon	499
Wates	818
Panjatan	1.028
Galur	324
Lendah	984
Sentolo	2.098
Pengasih	1.465
Kokap	2.846
Girimulyo	1.726
Nanggulan	617
Samigaluh	1.648
Kalibawang	843
Total	14.896

Sumber data: Sekretariat Daerah Kabupaten Kulonprogo, 2014

Dari tabel 1.1 dapat diketahui untuk RTLH program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo totalnya adalah 14.896 rumah yang tersebar di 12 Kecamatan yang ada di Kulonprogo. Untuk jumlah RTLH terbanyak berada di

⁵ <http://www.sapa.or.id/b1/99-k2/2439-penanggulangan-angka-kemiskinan-skpd-kp4k> ,diambil pada 9 Oktober 2014

Kecamatan Kokap dengan 2.846 rumah disusul dengan Kecamatan Sentolo sebanyak 2.098 rumah. Untuk Kecamatan yang paling sedikit jumlah RTLH nya berada di Kecamatan Galur dengan 324 rumah.

Melihat realitas sosial di atas ,yang cukup menarik untuk dicermati bahwa di kabupaten Kulonprogo perlu adanya sebuah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Kulonprogo untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Sejak tahun 2012 Program mandiri yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten kulonprogo salah satunya yaitu dengan mengadakan kegiatan Gentongrembes (Gerakan gotong royong rakyat bersatu) .Gentong rembes ini bisa berjalan dengan baik karena adanya kesepakatan tiap SKPD yang ada di kabupaten KulonProgo. Gentongrembes ini tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena program gentongrembes tidak menggunakan dana dari APBD kabupaten Kulonprogo.

Seluruh SKPD yang ada di di kabupaten Kulonprogo mempunyai tanggung jawab masing-masing yaitu dengan menjadi pelaksana dari program tersebut karena tiap SKPD mengeluarkan program gentongrembes yang berbeda seperti contohnya : Bedah rumah ,Beasiswa ,Kemiskinan tenaga kerja.

Dari latar belakang yang diuraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan penyusunan skripsi dengan Judul IMPLEMENTASI PROGRAM BEDAH RUMAH GERAKAN GOTONG ROYONG RAKYAT BERSATU DI KABUPATEN KULONPROGO 2013-2014

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, adapun rumusan masalah penelitian yaitu : **Faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi program bedah rumah di kabupaten Kulonprogo tahun 2013-2014?**

C. TUJUAN PENELITIAN

Menurut pendapat Sutrisno hadi tujuan dari penelitian adalah : menentukan pengembangan dan menguji kebenaran suatu kebenarannya suatu pengetahuan ,usaha mana yang dilakukan dengan metode ilmiah.⁶

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi program bedah rumah di tahun 2013-2014 di kulonprogo.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dalam melaksanakan program bedah rumah yang telah dilaksanakan di kabupaten Kulonprogo .
2. Membantu sumbangsih pemikiran kepada SKPD terkait, dengan adanya implementasi terhadap program tersebut sehingga memberi gambaran serta masukan dalam menurunkan angka kemiskinan di kabupaten kulonprogo.

⁶ Hadi Sutrisno, 1982, *Metode Research*. Gajah Mada Press, Yogyakarta , Hal.3

3. Bagi penyusun ,Penelitian ini supaya dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bentuk pembelajaran langsung di lapangan serta sebagai perbandingan antara teori-teori yang telah didapatkan selama belajar di bangku kuliah .
4. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan di bidang Implementasi kebijakan baik di masa sekarang dan masa yang akan datang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemikiran bagi penelitian selanjutnya yang serupa.

E. KERANGKA DASAR TEORI

1. KEBIJAKAN PUBLIK

Perencanaan rasional merupakan pendekatan rasional-deduktif terhadap pembuatan keputusan yang dimulai dengan sasaran (goals), yang kemudian dari sasaran ini didedukasike kebijakan,program,dan tindakan untuk mencapai sasaran.⁷

Chandler dan Plano (1988) Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam

⁷John M bryson,2007,*Perencanaan Strategis*,Pustaka Pelajar,Yogyakarta,hal 77

pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan public.⁸

Sedangkan Menurut pendapat Hogwood dan Gunn (1984 dalam parson,2006-cetakan kedua:15) menyatakan bahwa terdapat 10 istilah kebijakan dalam pengertian modern,yaitu :

- a. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas
- b. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan
- c. Sebagai proposal spesifik
- d. Sebagai keputusan Pemerintah
- e. Sebagai otorisasi formal
- f. Sebagai sebuah program
- g. Sebagai output
- h. Sebagai hasil (outcome)
- i. Sebagai teori dan model
- j. Sebagai sebuah proses⁹

Proses Terjadinya sebuah kebijakan publik ini terdiri dari :

- a. Formulasi Kebijakan

⁸ Hessel Nogi S. Tangkilisan,2003, "*Teori dan Konsep Kebijakan Publik*" dalam *Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*,Lukman Offset dan YPAPI, Yogyakarta , hal 1.

⁹ Op.cit, hal 17-18

Perumusan Kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Untuk itu ,pertama kali harus disadari beberapa hal hakiki dari kebijakab publik .Kebijakan publik ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri¹⁰.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya .Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik ,maka ada dua pilihan langkah yang ada,yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.¹¹

c. Evaluasi Kebijakan

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja ,kebijakan harus diawasi dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi kebijakan.Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituenya,Sejauh mana tujuan dicapai.Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.

¹⁰ Riant Nugroho D ,2003,*Kebijakan Publik Formulasi,Implementasi dan Evaluasi* ,Elex Media Komputindo,hal 101

¹¹ Ibid ,hal 158

Evaluasi kebijakan publik acapkali hanya dipahami sebagai evaluasi atas implementasi kebijakan saja (lihat pada winarno,2002).Sesungguhnya evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna,yaitu evaluasi perumusan kebijakan ,evaluasi implementasi dan evaluasi lingkungan kebijakan .Oleh karena ketiga komponen tersebutlah yang menentukan apakah kebijakan akan berhasilguna atau tidak.¹².

2. KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

a. Model Implementasi Kebijakan George C,Edward III

Alasan saya menggunakan teori dari George C,Edward III karena menurut saya teori mudah dipahami dan lebih cocok untuk mengukur sebuah keberhasilan sebuah program yang ada di Kabupaten Kulonprogo. Implementasi kebijakan secara praktis memerlukan adanya beberapa komponen yang terkait sehingga menjadikanya lebih terarah. Model Implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi.Empat variabel tersebut adalah komunikasi,sumber daya,disposisi dan struktur birokrasi.¹³

- 1) Komunikasi ,yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target

¹² Ibid,hal 184

¹³ Dwiyanto Indiahono,2009,*Kebijakan Publik* ,Gava Media, Yogyakarta Hal 31-32

group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan dengan baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

- 2) Sumberdaya , yaitu menunjuk setiap kebijakan yang harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran .
- 3) Disposisi , yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementator kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementator yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan

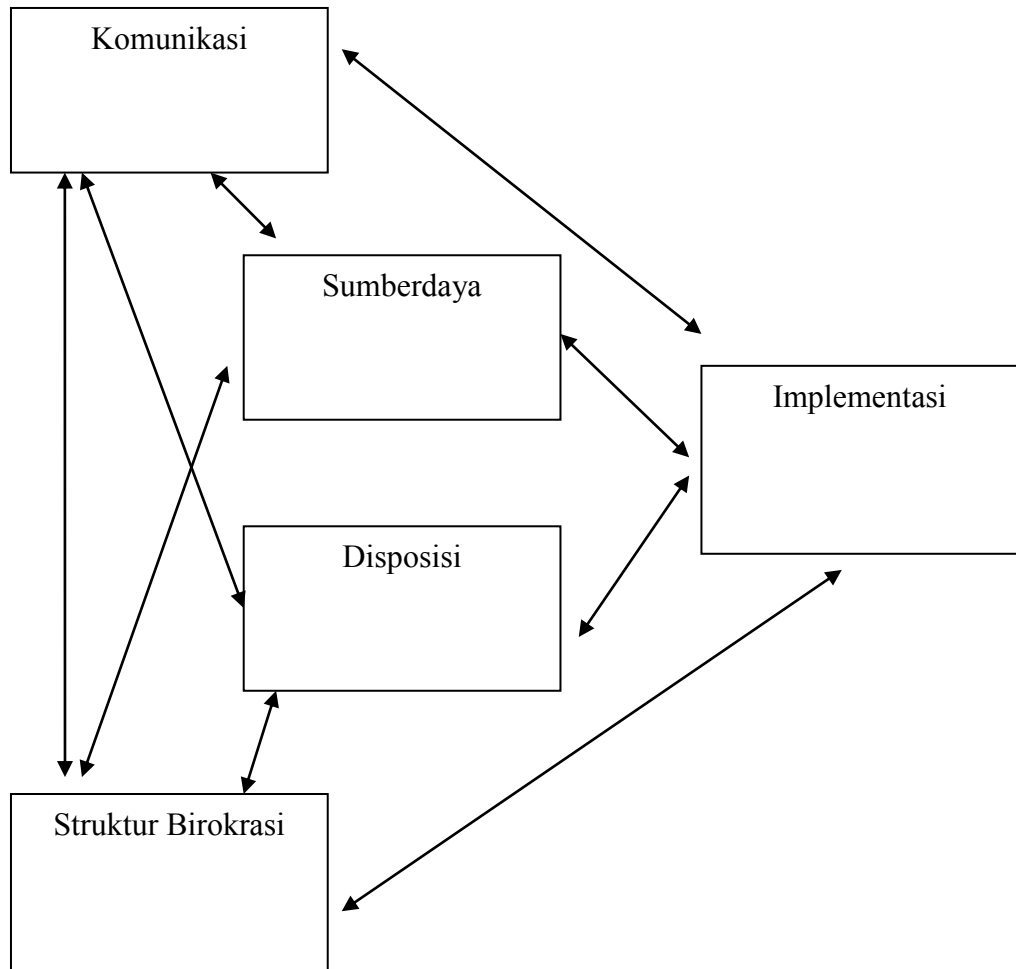
senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan.Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arus program yang telah digariskan dalam guideline program.Komitmen dan kejujuran membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten.Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran.Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

- 4) Struktur birokrasi,menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan.Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme ,dan struktur organisasi pelaksana sendiri.Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan.SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas,sistematis,tidak berbelit dan mudah dipahami untuk siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit,panjang dan kompleks.Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara

ringkas dan fleksibel menghindari ‘virus weberian’ yang kaku,terlalu hierarkhis dan birokratis.

Keempat variabel diatas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan antara satu faktor dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan.Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan.Misalnya saja,implementor yang tidak jujur serta tidak disiplin akan mudah sekali melakukan mark up dan korupsi atas dana program/kebijakan dan program tidak dapat optimal dalam mencapai tujuanya .Begitupun ketika watak dari implementor kurang demokratis akan sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran karena terjadinya kesenjangan.

Gambar 1.1 Model Implementasi Edward III¹⁴



Sumber:Edward III,1980;48

Model implementasi dari Edward ini dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program di berbagai tempat dan waktu. Artinya ,empat variabel yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan publik .

¹⁴ Ibid Hal 33,

Aplikasi model ini dalam kajian implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Aplikasi Konseptual model Edward III¹⁵

Aspek	Ruang Lingkup
Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Siapakah implementor dan kelompok sasaran dari program/kebijakan ? b. Bagaimana sosialisasi program/kebijakan efektif dijalankan ? <ul style="list-style-type: none"> -Metode yang digunakan -Intensitas komunikasi
Sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan Implementor <ul style="list-style-type: none"> -Tingkat pendidikan -Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta aplikasi detail program -Kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan b. Ketersediaan Dana <ul style="list-style-type: none"> -Berapa dana yang dialokasikan -Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi program/kebijakan.
Disposisi	<p>Karakter pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tingkat komitmen dan kejujuran:dapat diukur dengan konsistensi antara pelaksana kegiatan dengan guideline yang telah ditetapkan.Semakin sesuai dengan guideline semakin tinggi komitmennya. -Tingkat demokratis dapat diukur dengan intensitas pelaksana melakukan proses sharing dengan kelompok sasaran,mencari solusi dari masalah yang dihadapi dan melakukan diskresi yang berbeda dengan guideline guna mencapai tujuan dan sasaran program.
Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami b. Struktur organisasi <ul style="list-style-type: none"> -Seberapa jauh rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana.Semakin jauh berarti semakin rumit,birokratis dan lambat untuk merespon perkembangan program

¹⁵ Ibid ,hal 34

b. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dengan Carl Van Horn

Model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn adalah model yang paling klasik dengan menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat untuk mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan, adapun beberapa Variable yang mempengaruhi kebijakan publik menurut Donald dan Metter :¹⁶

- 1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.
- 2) Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non-human resources)
- 3) Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang

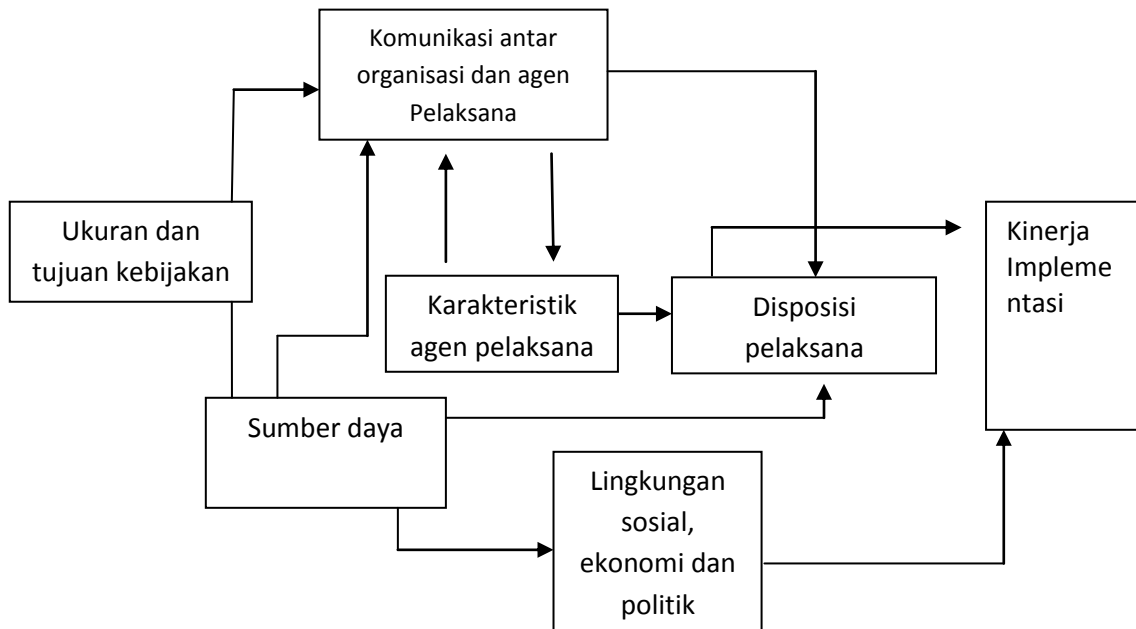
¹⁶Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.99

semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasikebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni:
 - a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untu melaksanakan kebijakan.
 - b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.
 - c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Lebih Jelasnya dijelaskan pada gambar berikut ini:¹⁷

¹⁷Ibid.

Gambar 1.2 Implementasi Van Meter dan Van Horn



Sumber: Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005: 99)

c. Model Mazmanian dan Sabatier

Setelah adanya implementasi model klasik seiring berjalanya waktu munculah model kedua yang dikembangkan oleh oleh Daniel Mazmanian dan Paul A.sabatier pada tahun 1983 yang mengatakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

Katanya “implementation is the carrying out of basic policy decision,usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executives ordes or court decission.Ideally,that decission identifies the problem(s) to be addressed,stipulates the objective(s) to be

pursued, and, in a variety of ways, 'structures' the the implementation process.¹⁸

Model mazmanian dan Sabatier disebut model kerangka Analisis Implementasi (A Framework for Implementation Analysis). Mazmanian dan Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan pada 3 variabel.¹⁹

- 1) Variabel independen yaitu adalah mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- 2) Variabel intervening yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

¹⁸ Riant Nugroho, 2011, *Public Policy*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hal 629

¹⁹ Ibid, hal 629

- 3) Variabel dependen yaitu adalah tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan-pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam disusunnya kebijakan pelaksana,kepatuhan objek,hasil nyata,penerimaan atas hasil nyata tersebut,dan akhirnya mengarah pada revisi kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

d. Model Grindle

Berikutnya adalah model Merilee S. Grindle (1980).Dikemukakan oleh Wibawa(1994) bahwa model grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan,barulah implementasi kebijakan dilakukan.Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan.
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan
- 5) (Siapa) pelaksana program.
- 6) Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu ,konteks implementasinya adalah :

- 1) Kekuasaan,kepentingan,dan strategi aktor yang terlibat.

- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap

Namun demikian, jika kita mencermati model Grindle, kita dapat memahami bahwa keunikan model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.²⁰

e. Model Elmore, dkk

Model yang disusun oleh Richard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971) dan Benny Hjern dan David O'Perter (1981). Model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: Tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya ditataran rendah. Oleh karena itu kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya, dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh

²⁰ Ibid, hal 634

masyarakat ,baik secara langsung maupun melalui lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM).²¹

Jadi Pada Model yang disusun oleh Elmore,Lipsky,Benny Hjern Dan David O'Perter ini dimulai dari melakukannya sebuah identifikasi kepada para jaringan aktor yang terlibat pada proses pelayanan serta menanyakan kepada mereka .Model ini lebih menekankan kepada masyarakat untuk melakukan sendiri proses implementasi kebijakannya meski tetap melibatkan pejabat pemerintah yang ada di tataran bawah .Kebijakan model ini diusulkan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung .

3. PEMERINTAH KABUPATEN

a) Pengertian umum

Pengertian secara umum Pemerintah menurut pendapat W.S. Sayre mengatakan bahwa Government is best as the organized agency of the state,expressing and exercising its authority maksudnya adalah Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai Organisasi dari negara,yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaanya.²²

²¹ Ibid,hal 636

²² Inu Kencana,2011,*Sistem Pemerintahan Indonesia* ,Rineka Cipta,Jakarta,hal 9

Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah bawahan dari provinsi, karena itu bupati atau walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Meski istilah kabupaten saat ini digunakan di seluruh wilayah Indonesia, istilah ini dahulu hanya digunakan di pulau Jawa dan Madura saja. Pada era Hindia Belanda, istilah kabupaten dikenal dengan regentschap yang secara harafiah artinya adalah daerah seorang regent atau wakil penguasa. Pembagian wilayah kabupaten di Indonesia saat ini merupakan warisan dari era pemerintahan Hindia Belanda. Dahulu istilah kabupaten dikenal dengan Daerah Tingkat II Kabupaten. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, istilah Daerah Tingkat II dihapus, sehingga Daerah Tingkat II Kabupaten disebut Kabupaten.²³

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti.

²³<http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten> diambil pada 25 november 2014

Menurut Undang-Undang 32 tahun 2004 Pasal 3

(1) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah:

- a. pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi;
- b. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

(2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

b) Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten terdiri atas pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten. Pemerintah kabupaten terdiri atas bupati dan perangkatnya. Perangkat daerah kabupaten terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.²⁴

²⁴<http://www.bukupr.com/2012/01/struktur-organisasi-pemerintahan.html> diambil senin 24 november 2014

Gambar Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten 1.3



1) Bupati

Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusulkan oleh partai politik).

2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3) Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Tugas sekretaris daerah adalah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

4) Sekretariat DPRD

Tugas sekretariat DPRD antara lain :

- a) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD
- b) Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
- c) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- d) Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam pelaksanaan fungsinya sesuai kemampuan daerah.

5) Polisi Pamong Praja

Tugas polisi pamong praja adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta merupakan penegak peraturan daerah.

6) Kecamatan

Kecamatan merupakan bagian dari wilayah kabupaten. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Wilayah kecamatan terdiri atas beberapa desa/kelurahan.

7) Kelurahan

Wilayah kelurahan terdapat di daerah kota. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah. Kelurahan merupakan perangkat kabupaten/kota di bawah kecamatan.

8) Dinas Daerah

Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas. Kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Contoh dinas daerah antara

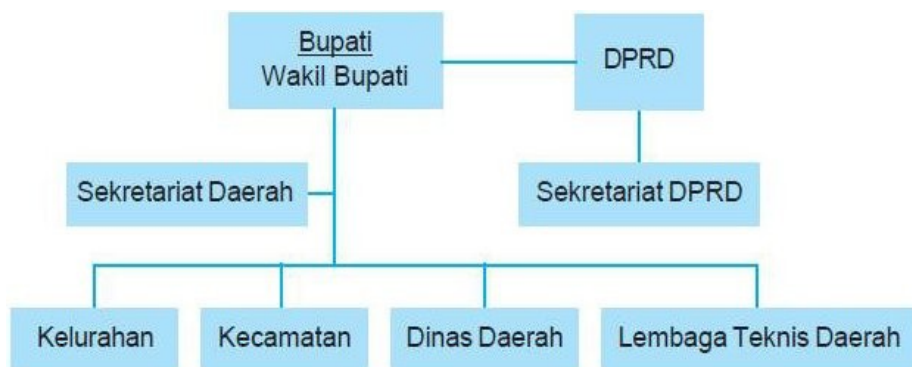
lain dinas pendidikan, dinas pekerjaan umum, dinas kesehatan, dinas pendapatan daerah, dan sebagainya.

9) Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang sifatnya spesifik yang berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.

Berikut ini adalah contoh lain struktur organisasi pemerintah kabupaten .

Gambar Lembaga Teknis Daerah 1.4



c) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Dasar hukum dari SKPD adalah UU no 32 tahun 2004 (UU pemda) dimana pada Pasal 151 disebutkan bahwa :

- a. Satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

- b. Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

F. DEFINISI KONSEPSIONAL

1. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan George C. Edward III adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan padatercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.²⁵

2. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah yang dibuat berdasarkan intervensi politik dan menggunakan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat.

²⁵Sumodiningrat, Gunawan. 2000. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan alternatif pilihan dalam mengambil sebuah keputusan .

3. Pemerintah Kabupaten

Setelah diberlakukanya otonomi daerah ,Pemerintah kabupaten adalah organisasi dari negara yang berhak untuk mengurus rumah tangganya sendiri sehingga mempunyai kewenangan dan kekuasaan di tingkat daerah.

G. DEFINISI OPERASIONAL.

Proses implementasi kebijakan menurut teori George C. Edward IIIterkait dengan:

1. Komunikasi:

- a. Sosialisasi pada program bedah rumah.
- b. Rapat koordinasi

2.Sumber Daya:

- a. Kemampuan implementor meliputi tingkat pendidikan,tingkat pemahaman terhadap tujuan serta kemampuan untuk menyampaikan program dan mengarahkan .
- b. Ketersedian dana meliputi berapa dana yang akan dialokasikan dan prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi program bedah rumah.

3. Disposisi

Disposisi ini ruang lingkungannya adalah karakter dari pelaksana program bedah rumah yang meliputi tingkat komitmen dan kejujuran.

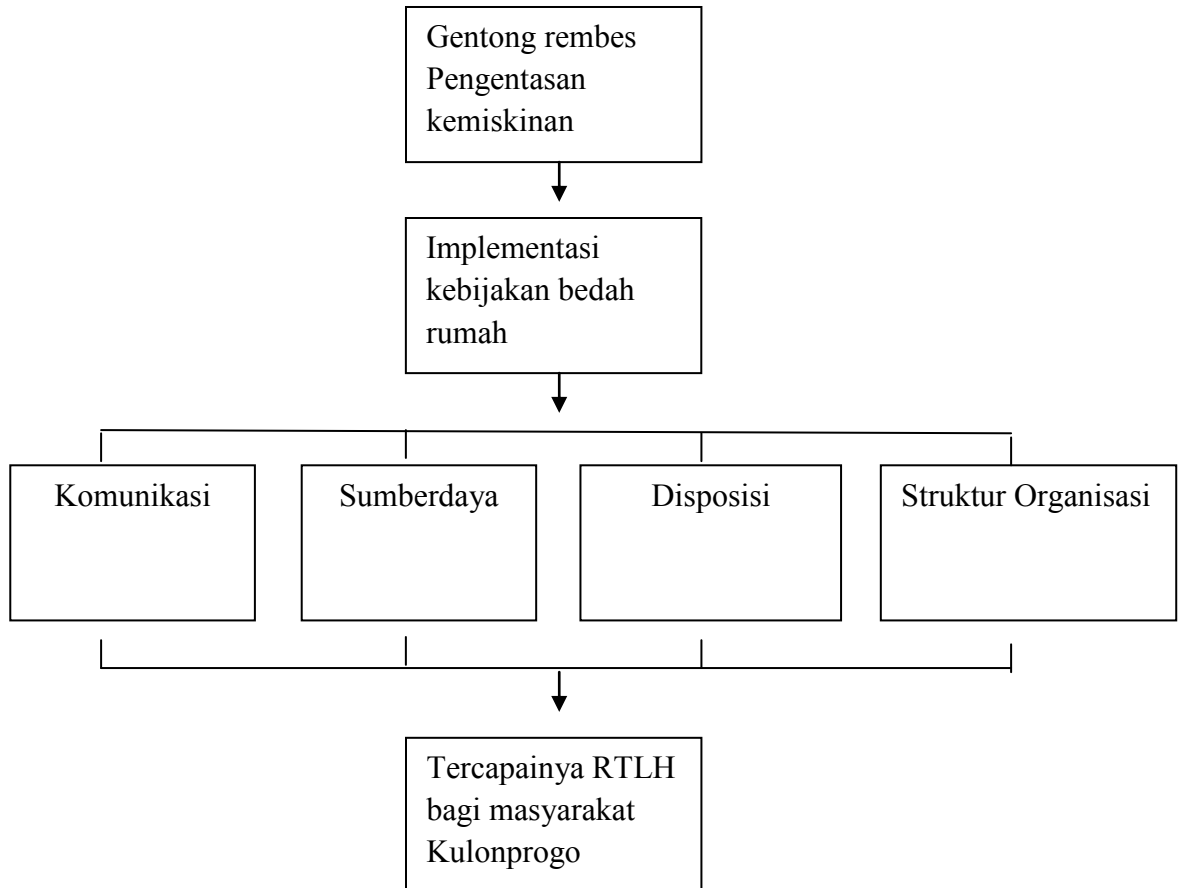
4. Struktur birokrasi

Tersedianya Standart Operasional Prosedur yang mudah untuk dipahami.

H. KERANGKA BERPIKIR

Mengacu pada teori Edward bahwasannya analisis proses implementasi suatu kebijakan / program dapat dilakukan dengan melihat 4 aspek, yakni implementasi dilihat dari aspek ; 1) Komunikasi, 2) Sumberdaya, 3) Disposisi dan 4) Struktur Organisasi.

Gambar 1.5 Kerangka Berpikir Bedah Rumah



I. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif. Menurut Anselm Strauss dan Juliet Corbin istilah penelitian kualitatif maksudnya adalah sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, sebenarnya istilah penelitian kualitatif bisa membingungkan, karena lain orang lain pula pemahamannya. Beberapa peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan.

Dua teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, kaset video dan bahkan data yang telah dihitung dengan tujuan lain, misalnya data sensus. Terdapat banyak alasan yang sah untuk melakukan penelitian kualitatif salah satunya adalah kemantapan peneliti berdasarkan penelitiannya. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikit pun belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk menambah wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Demikian pula metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.²⁶

Dalam melakukan penelitiannya, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan Implementasi Program bedah rumah yang ada di kabupaten Kulonprogo. Kemudian untuk mengetahui secara mendalam mengenai tingkat keseriusan atau sikap pelaksanaan Program Bedah rumah dalam pemanfaatan budaya luhur dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Kulonprogo khususnya dengan mengambil sampel warga penerima program bedah rumah yang tersebar di kecamatan Kokap dan Sentolo ditujukan untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang mejadi kelebihan maupun kelemahan dari Program bedah rumah ini.

²⁶ Anselm Straus dan Juliet Corbin, 2009, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Cetakan III, Pustaka Pelajar Yogyakarta, hal 4-5.

2. Data dan sumber Data

Sumber data yang nantinya digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diperoleh melalui wawancara/tanya jawab dengan narasumber yaitu implementor dan penerima program bedah rumah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara langsung mendukung sumber data primer yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal penelitian, kutipan hasil penelitian, data statistik, media masa/elektronik, internet maupun hasil penelitian terdahulu yang berwujud dalam laporan penelitian, atau sumber-sumber tertulis lainnya yang sangat berkaitan dengan fokus penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden/narasumber berupa keterangan atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan dinas terkait yakni dari Dinas Sekretariat

Daerah Kabupaten Kulonprogo sebagai implementor dan warga penerima bedah rumah.

b.Data Sekunder

Adalah data-data yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan data pendukung yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data ini dikumpulkan dengan mencatat/mengutip dari buku-buku, artikel, internet, penelitian terdahulu, mencatat dari instansi terkait dan dokumen-dokumen tahunan yang diperoleh dari tempat penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

A) Untuk Data Primer penulis menggunakan teknik :

1. Wawancara :

adalah pengambilan data secara langsung dengan cara menanyakan langsung bisa dengan tanya jawab. Wawancara akan dilakukan dengan narasumber yang memiliki kapasitas dan kapabilitas agar bisa memberikan informasi yang berguna dan penting. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan indikator teori untuk mendapatkan data terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi yang berupa komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, disposisi. Kemudian untuk narasumber yang akan dijadikan informan dalam wawancara ini adalah Kabid/Kabag Dinas Sekretariat bidang kesra yang bertanggung jawab

secara langsung dan menjadi pelaksana dari program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo.

2.Observasi:

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap unsur objek penelitian yang tampak guna memperoleh gambaran secara umum program bedah rumah atau gejala-gejala pada objek penelitian. Observasi saya lakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kulonprogo ,Kecamatan Kokap yaitu di kelurahan Hargorejo, Hargomulyo dan Kecamatan Sentolo yaitu di kelurahan Kaliagung. Pada tahap observasi terdapat banyak kendala yaitu dikarenakan sasaran penerima bantuan bedah rumah banyak yang sedang bekerja sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk bertemu langsung dengan narasumber .

B)Untuk data Sekunder penulis menggunakan teknik :

1.Dokumentasi:

Dokumentasi Adalah pengumpulan data dengan cara mengutip data atau dokumen-dokumen yang sudah ada di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kulonprogo. Dokumentasi ini berupa arsip/dokumen, tulisan catatan, tabel, maupun profil tempat untuk lokasi penelitian.

2.Studi Pustaka:

Studi Pustaka adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan sejumlah teori dan informasi yang erat hubungannya dengan materi penelitian. Hal ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, penelitian terdahulu dan sumber-sumber referensi lainnya terkait dengan fokus penelitian yang diteliti yakni yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Bedah rumah. Tujuannya adalah untuk memperoleh data tambahan guna mendukung kelengkapan data-data maupun informasi penelitian yang telah diperoleh dengan teknik pengumpulan data primer sebelumnya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data adalah dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif deskriptif. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono menjelaskan langkah analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif terdiri dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Adapun tahap-tahap teknik analisis data yang digunakan meliputi:²⁷

a) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan dan mengubah data kasar yang diperoleh dari lapangan. Data kasar yang dimaksud disini adalah keterangan-keterangan atau

²⁷ Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kesepuluh, Alfabeta, Bandung, hal.90

informasi yang diuraikan informan tetapi tidak relevan dengan fokus masalah penelitian sehingga perlu direduksi.

b) Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun dari hasil reduksi data. Hasil reduksi data kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dibaca atau dipahami. Untuk lebih menjelaskan uraian maka dapat dibuat gambaran berupa diagram interaktif tentang fenomena yang terjadi.

c) Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dan tetap mengacu pada rumusan masalah serta tujuan yang nantinya hendak dicapai.